

PERANAN PEMERINTAH DI BIDANG PEREKONOMIAN : PILIHAN PUBLIK DAN EKSTERNALITAS

DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM



Pemerintah tidak selamanya bisa mempengaruhi aktivitas perekonomian dengan menghimbau masyarakat agar jangan menimbulkan polusi, agar bersikap inovatif, mau berkorban mempertahankan tapal batas negara. Untuk itu pemerintah harus mengeluarkan UU untuk menghimbau.

Instrumen utama yang digunakan adalah

- a. Pajak yang memperkecil konsumsi atau investasi pribadi agar tersedia sumberdaya untuk pembelanjaan umum, termasuk jenis pajak yang tujuannya untuk merangsang atau mencegah kegiatan ekonomi tertentu.
- b. Pembelanjaan yang mendorong perusahaan atau pekerja menghasilkan suatu jenis barang atau jasa tertentu, termasuk juga transfer.
- c. Regulasi atau pengendalian yang merupakan pengarahan bagi orang agar melaksanakan atau menghentikan aktivitas ekonominya.



EVOLUSI POLITIS:

UU tentang upah minimum, keharusan pertanggung-jawaban kecelakaan kerja, pensiun hari tua, tunjangan sosial, maksimum jam kerja, kondisi pabrik, penawaran kolektif dan hubungan perburuhan yang adil.



FUNGSI PEMERINTAH:

- a. Pembentukan kerangka landasan hukum.
- b. Penentuan kebijakan stabilitas makro ekonomi.
- c. Mempengaruhi alokasi sumberdaya untuk memperbaiki efisiensi ekonomi.
- d. Penciptaan program yang mempengaruhi distribusi pendapatan

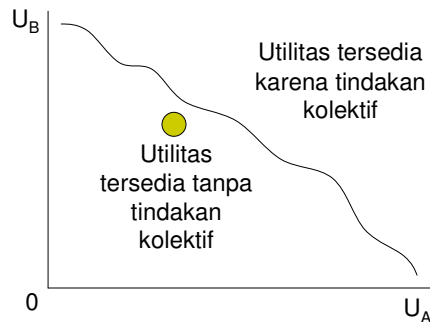
Fungsi ekonomi pemerintah adalah bersifat makro ekonomi dengan tujuan mencegah pengangguran kronis dan kemacetan pertumbuhan serta menekan inflasi. Ada dua senjata utama yaitu kebijakan moneter dan fiskal.

Tujuan ekonomis sentral kedua adalah membantu alokasi sumberdaya menurut keinginan masyarakat.

Pemerintah seharusnya menciptakan kerangka landasan hukum yang adil dan efektif, kebijakan makro ekonomi yang optimal untuk menstabilkan hasil produksi, pengangguran dan inflasi, mengatur industri untuk mengatasi kegagalan pasar, mendistribusikan pendapatan.



Pilihan publik dan garis perbatasan kemungkinan utilitas



Implikasi dari pilihan publik

Kegagalan pemerintah terjadi jika kebijakan pemerintah atau tindakan kolektif mengambil langkah-langkah yang tidak dapat memperbaiki efisiensi ekonomi atau distribusi pendapatan yang dapat diterima secara etis.

Dari semua kegagalan pasar yang paling gawat adalah jika suatu komoditi merupakan korban pengaruh eksternal atau eksternalitas.

Eksternalitas atau efek samping adalah jika produksi atau konsumsi menimbulkan biaya atau manfaat tak sengaja bagi yang lainnya, yaitu biaya atau manfaat dikenakan pada orang lain, tetapi tidak dibayar oleh mereka yang mengenakan itu.



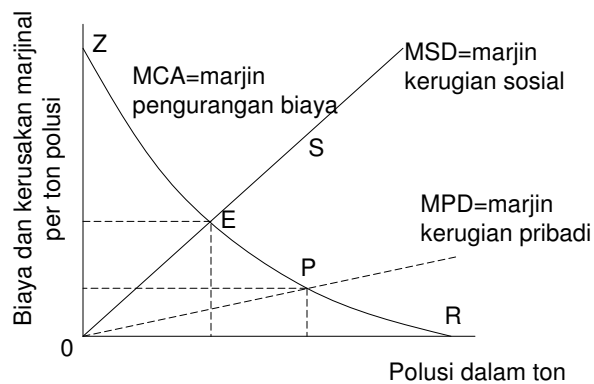
Barang Publik VS Barang Swasta

Manfaat dari barang publik adalah efek konsumsi eksternal yang tak dapat dipilah-pilah menurut tiap orang. Kalau suatu barang dapat dipecah-pecah dan dijual terpisah secara bersaing kepada masing-masing orang tanpa menimbulkan efek eksternal bagi yang lainnya, maka barang tersebut termasuk barang swasta. Barang publik umumnya memerlukan tindakan kolektif untuk pengadaannya, sedangkan barang swasta disediakan oleh pasar secara efisien.



Barang Kolektif dan Barang Pasar

Suatu barang pasar jika dialokasikan melalui pasar yang didesentralisasi. Barang kolektif jika dialokasikan melalui proses politik atau pilihan publik.



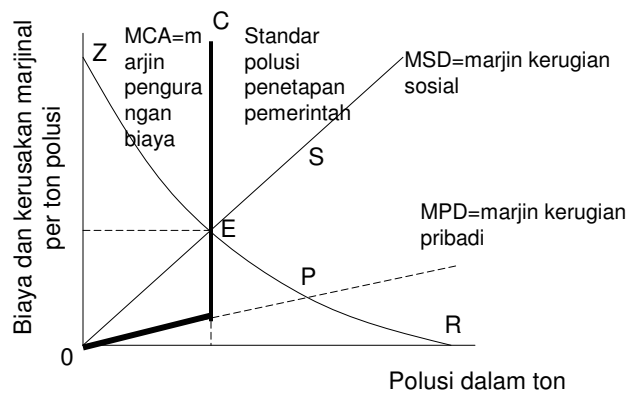
MSD dan MPD dengan kemiringan ke atas mencerminkan kerusakan inkremental yang terjadi pada barang dan orang akibat polusi. Garis putus-putus adaslah kerusakan marginal yang diderita oleh perusahaan

MCA menggambarkan biaya marginal dari penanggulangan polusi. Pada tingkat polusi yang tinggi biaya penanggulangannya murah, sedang pada titik polusi Z biayanya mahal.

Suatu perekonomian laissez faire yang tidak di atur pemerintah akan menghasilkan polusi (eksternalitas) sampai suatu tingkat dimana kerusakan swasta marginal sama dengan biaya penanggulangan swasta marginal. Hasil akhir yang efisien akan tercapai kalau kerusakan sosial marginal sama dengan biaya penanggulangan sosial marginal.

Ada dua pendekatan swasta, yaitu negosiasi swasta dan keharusan pertanggung jawab.

Penghasilan eksternalitas secara hukum bertanggung jawab atas tiap-tiap kerusakan yang ditimbulkan pada orang lain.



Pemerintah menetapkan bahwa perusahaan tidak boleh menyebabkan polusi lebih dari yang ditetapkan, bila melanggar maka akan dikenakan denda, maka perusahaan akan menghadapi kurva biaya swasta marjinal (kerusakan plus denda) berbentuk garis patah 0BEC dengan pilihan titik keseimbangan di E.

Problem penetapan sangsi.

1. Pemerintah harus melakukan analisis biaya-manfaat (benefit cost analysis), dengan menghitung kerusakan sosial dan biaya penanggulangan serta memilih tingkat polusi dengan tingkat biaya minimum
2. Penerapan yang susah, seringkali denda pinalti sangat kecil sehingga perusahaan senang melanggar dan bergerak ke titik P
3. Peraturan ini tidak dapat mengalokasikan upaya pengurangan polusi secara efisien, sehingga justru perusahaan dengan biaya penanggulangan polusi marjinal yang rendah yang paling banyak melakukan penanggulangan

Untuk menghindari kegagalan pengendalian langsung maka dikenakan pajak emisi polusi (pajak eksternalitas) senilai kerusakan eksternal yang ditimbulkan

Literatur:

Paul A.Samuelson & William D. Nordhaus, Economic,
McGraw-Hill, Inc., terjemahan ekonomi (edisi Indonesia)

